



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**UNIT KERJA** : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN, KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SIRAJUDIN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM
3. NHK : 444726

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/40 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 79.000.000

1. MOBIL, SUZUKI VITARA Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.635.493

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 607.635.493

**III. HUTANG** Rp. 99.776.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 507.859.493

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.